

HUBUNGAN PATRON-KLIEN MASYARAKAT NELAYAN DI KAMPUNG TANJUNG LIMAU KELURAHAN GUNUNG ELAI KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG

Muhammad Firzan¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menginterpretasi karakteristik para nelayan dan punggawa di Tanjung Limau, untuk menggambarkan dan menginterpretasi perbandingan sumber daya yang dimiliki oleh keduanya, untuk menggambarkan dan menginterpretasi fungsi-fungsi dan peran mereka dalam pola hubungan nelayan-punggawa, untuk menggambarkan dan menginterpretasi pola-pola hubungan yang terjalin antara para nelayan dan punggawa, Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian terdiri dari hubungan antara sang juragan dan para buruh yaitu meliputi Hubungan Ekonomi, Hubungan Sosial dan Hubungan Politik. Lokasi Penelitian di Tanjung Limau Kota Bontang, Sumber Data yang di dapatkan melalui Data Primer yaitu Sang Punggawa, Anak Si Punggawa, Perwakilan Masyarakat Sekitar dan Para Buruh Nelayan Sedangkan Data Sekunder di dapatkan dari Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi atau pengamatan dan Wawancara Mendalam. Tehnik Analisis Data yang digunakan dengan cara melihat catatan observasi secara keseluruhan dan dokumentasi foto-foto yang terkumpul, Melihat penonjolan informasi jawaban informan dimana kekuatan dan kualitas data informasi ditentukan oleh posisi dan peran informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat nelayan Tanjung Limau pada umumnya masih menangkap ikan dengan alat tangkap tradisional, serta menggunakan ukuran perahu yang bervariasi dari ukuran yang kecil hingga ukuran yang besar. Dengan adanya variasi alat tangkap tersebut maka penduduk yang terlibat dalam usaha pada sektor ini terstratifikasi ke dalam beberapa lapisan seperti, punggawa pemilik kapal dan buruh nelayan yang mengoperasikan kapal. Hubungan antara sang punggawa dan para buruh nelayan memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yaitu hubungan ekonomi, hubungan sosial dan hubungan politik. Dari permasalahan tersebut bisa dibandingkan perbedaan sumber daya diantara keduanya. Sang punggawa dengan status sosial-ekonominya yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan-perlindungan terhadap si buruh. Sehingga si buruh nelayan merasa memiliki hutang budi terhadap sang punggawa menyebabkan si buruh selalu patuh dan taat kepada sang punggawa. Terlepas dari itu dalam kehidupan ekonomi si buruh yang selalu terhimpit dalam kekurangan akibat dari upah yang diterima si buruh tidak sesuai dengan hasil

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: firza459@gmail.com

dan kerja keras yang dilakukan untuk sang punggawa. Sehingga peran sang punggawa yaitu memberikan kompensasi-kompensasi berupa bantuan kepada anak buahnya yang sedang mengalami kesusahan. Ironisnya hal tersebut menjadi suatu kondisi yang dapat di terima oleh si buruh mengingat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sang punggawa. Sehingga bagi si buruh maupun punggawa hubungan ini akan terus berlanjut lama karena menurut mereka hubungan ini memberikan keuntungan bagi keduanya .

Kata Kunci : *Patron-Klien, Ekonomi, Sosial, Politik, Masyarakat Nelayan.*

Pendahuluan

Kota Bontang awalnya hanya merupakan perkampungan yang terletak di daerah aliran sungai, kemudian mengalami perubahan status, sehingga menjadi sebuah Kota. Sebelumnya kota ini hanya sebagai kawasan permukiman, pada 1989, dengan PP No. 22 Tahun 1988. Kecamatan Bontang disetujui menjadi Kota Administratif dan diresmikan pada 1990 dengan membawahi Kecamatan Bontang Utara (terdiri dari Bontang Baru, Bontang Kuala, Belimbing, Lok Tuan) dan Selatan (Sekamping, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Satimpo, dan Tanjung Laut). Pada 12 Oktober 1999, Kotif kemudian berubah menjadi Kota Otonom, berdasarkan Undang-Undang No 47 Tahun 1999. Setelah sebelumnya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam perbendaharaan asli Kalimantan tidak dikenal kata ‘bontang’ . Menurut cerita turun-temurun, bontang merupakan akronim bahasa belanda, ‘bond’ yang berarti kumpulan atau dalam bahasa inggris yang artinya ikatan persaudaraan, serta ‘tang’ dari kata pendatang. Sebutan ini diberikan, karena cikal bakal kampung Bontang tidak terlepas dari peran pendatang. Maka dari itu, nelayan bajau yang memiliki tradisi merantau, pada mulanya membuka pemukiman di sekitar pesisir Bontang. Sekarang kehadiran mereka diikuti nelayan dan pedagang asal Bugis serta Mandar yang juga membuka pemukiman. Sekitar tahun 1930-an, pesisir Bontang diramaikan pemukiman penduduk dari berbagai etnis seperti Bajau, Bugis, Melayu, Kutai dan Jawa. Mereka hidup berdampingan dan rukun serta saling menghormati satu sama lain, dan bahkan menganggap diri warga asli Bontang. Asal usul etnis dan keturunan perlahan melebur, karena diantara mereka melakukan perkawinan antaretnis, sekaligus mempererat persaudaraan sesama warga asli Bontang. Pada akhirnya sebagian dari mereka memilih untuk pindah dan mencari pemukiman baru di sebelah selatan atau yang di sebut Tanjung Laut, dan sebagian lagi menuju ke utara sekarang di sebut dengan Loktuan dan Tanjung Limau.

Dalam menangkap ikan, nelayan Tanjung Limau menggunakan alat tangkap yang masih bersifat tradisional, serta menggunakan ukuran perahu yang bervariasi, dari perahu layar ukuran kecil sampai perahu motor ukuran besar. Dengan adanya variasi alat penangkapan ikan seperti itu maka penduduk yang terlibat dalam usaha di sektor ini terstratifikasi ke dalam beberapa lapisan seperti juragan pemilik perahu dan nelayan yang mengoperasikan perahu tersebut, di

samping ditemukan juga nelayan yang sekaligus mengoperasikan perahunya sendiri yang pada umumnya dalam ukuran kecil. Tidak mengherankan apabila pada sektor ini pertentangan antar teknologi penangkapan ikan modern dan tradisional merupakan masalah yang cukup penting, disamping masalah di sekitar proporsi pembagian pendapatan antara punggawa dan awak kapal.

Di Tanjung Limau masyarakat nelayan ada yang bekerja sendiri sebagai nelayan atau sebagai pekerja bawahan. Meskipun demikian dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan, mereka tidak terlepas dari keberadaan Punggawa yang memiliki semua kapal yang mereka pakai dalam mencari ikan. Punggawa adalah orang yang melakukan tindakan jual beli dalam skala yang cukup besar sehingga sering pula disebut pengepul sedangkan juragan ialah orang yang membawa kapal atau mengemudikan kapal dan menumutuskan arah dimana tempat ikan berkumpul berdasarkan dari pengalaman dari seorang juragan sehingga hasil tangkapan yang telah di dapatkan maka akan langsung diberikan kepada punggawa di darat. Hal ini melihat bahwa keberadaan nelayan sebagai bawahan sebagian besar hidup dalam kemiskinan, sekalipun bekerja tanpa henti yang dimana dominasi dan hegemoni punggawa terhadap seluruh system kehidupan nelayan maka perlu mewujudkan sebuah penelitian terhadap masyarakat nelayan mengenai hubungan kerja dan hubungan sosial serta bagaimana pengaruhnya kedepan terhadap kelangsungan hubungan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka nelayan di Tanjung Limau menarik untuk di teliti karena punggawa kapal yang hanya berdiam diri di rumah tidak bersusah payah untuk bekerja, akan tetapi penghasilan atau keuntungan yang di dapat oleh si juragan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan para nelayan (ABK) yang selalu berusaha dan bersusah payah bekerja dari pagi hingga sore, terkadang pula tidak menentu kapan mereka bisa kembali ke daratan. Akan tetapi mengapa kondisi ekonomi mereka selalu kekurangan.

Kerangka Dasar Teori

Teori dan Konsep

Scoot (1972) mengatakan bahwa hubungan patron-klien adalah suatu kasus khusus hubungan antara dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduduanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memeberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan mulus, diperlukan adanya unsur-unsur tertentu di dalamnya.

1. Bahwa apa yang diberikan oleh satu pihak adalah sesuatu yang berharga di mata pihak yang lain, entah pemberian itu berupa barang ataupun jasa, dan bisa berbagai ragam bentuknya.

2. Dalam hubungan patron-klien ada unsur non koersif kata Scoot, yang membedakannya dengan hubungan yang bersifat pemaksaan (*coercion*) atau hubungan karena adanya wewenang formal (*formal authority*).
3. Sifat relasi hubungan ini luwes dan meluas. Seseorang patron misalnya, tidak saja dikaitkan oleh hubungan sewa-menyewa tanah dengan kliennya, tetapi juga oleh hubungan sesama tetangga, atau mungkin teman sekolah di masa yang lalu, atau orang-orang tua mereka saling bersahabat, dan sebagainya.

Menurut Hopkins, patron-klien merupakan bentuk pertukaran *dyadic* dan personal yang biasanya ditandai dengan perasaan berkewajiban, dan sering juga oleh keseimbangan kekuasaan yang tidak setara antar mereka yang terlibat (Hopkins, 2006). Lebih lanjut Kitschelt (2000), patron-klien didefinisikan dengan “timbal balik, kesukarelawanan, eksploitasi, dominasi, dan asimetri”. Selain itu, beliau menekankan bahwa meskipun eksploitasi karakter, hubungan patron-klien adalah menguntungkan satu sama lain bagi patron dan client (Kitschelt 2000: 849).

Patron atau mereka yang memiliki status ekonomi tinggi selalu dirundung dilema, yakni antara memilih memenuhi kewajiban moral kepada klien guna menikmati bersama yang ia peroleh dari kontribusi klien atau memilih mengakumulasi modal yang ia miliki (Everes, 1994: 7-8). Dalam kondisi ini, ada kecenderungan patron memilih memberikan kompensasi kepada kliennya sebagai bentuk akumulasi status kehormatan bagi diri patron.

Hubungan patron-klien yang dibuat oleh Scoot rupanya atas dasar uraian dari Wolf (1966). Dalam pandangan Wolf suatu relasi kekerabatan merupakan hasil dari proses sosialisasi seseorang dalam hidupnya, dimana terkandung di dalamnya rasa saling percaya yang dapat dimanfaatkan olehnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan ini juga di dasari oleh sanksi-sanksi yang ada di dalam sistem kekerabatannya ataupun oleh sanksi-sanksi dari masyarakatnya. Jika ada kerabat yang tidak bertindak seperti yang diharapkan oleh kerabat lainnya atau tindakannya dianggap tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sanksi-sanksi tersebut dapat diterapkan. Ini berbeda dengan hubungan persahabatan yang instrumental, yang terjadi karena masing-masing pihak saling mempunyai kepentingan dan masing-masing juga bertindak dan dipandang sebagai suatu alat penghubung yang potensial ke orang-orang lain di luar hubungan antar dua pihak ini. Masing-masing individu disini merupakan sponsor bagi yang lain (Wolf, 1966: 7-18).

Ciri-ciri Patron-Klien

Lebih jauh scoot juga mengemukakan bahwa hubungan patronese ini mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan hubungan sosial lain. Pertama, yaitu terdapatnya ketidaksamaan (*inequality*) dalam pertukaran; kedua, adanya sifat tatap muka (*face to face character*), dan ketiga adalah sifatnya yang luwes dan meluas (*diffuse flexibility*). Menguraikan ciri pertama Scoot bilang bahwa disitu terdapat ketimpangan pertukaran:

“disini terdapat ketidakseimbangan dalam pertukaran antara dua pasangan, yang mencerminkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Dalam pengertian ini seorang klien adalah seseorang yang masuk dalam hubungan pertukaran yang tidak seimbang (unequal), di mana dia tidak mampu membalas sepenuhnya. Suatu hutang kewajiban membuatnya tetap terikat pada patron”.

Ketimpangan ini terjadi karena patron berada dalam posisi pemberi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh si klien beserta keluarganya agar mereka bisa tetap hidup. Rasa wajib membalas pada diri si klien muncul lewat pemberian ini selama pemberian tersebut masih dirasakan mampu memenuhi kebutuhannya yang paling pokok atau masih diperlukan.

Mengenai bentuk hubungan patronese itu sendiri Wertheim berpendapat bahwa dalam hubungan tersebut (patron-klien) dapat masuk suatu bentuk eksploitasi yang jelas, namun oleh karena relasi ini bersifat pribadi, informal, serta sedikit banyak paternalistis, maka ada kecendrungan untuk kemudian memanusiawikannya (Wertheim,1969:362).

Tujuan Patronese

Timor Sharan (2009) menyatakan proses mempertahankan kekuasaan sebuah rezim atau pemimpin suatu wilayah dilakukan dengan cara mengakomodasikan kekuasaan melalui kebijakan yang mengakomodasi cara tawar menawar yang terjalin dalam jaringan elit yang berbeda. Dimana jaringan elit tersebut telah terkooptasi ke dalam lingkungan rezim. Pada akhirnya, pemimpin rezim membentuk sebuah sistem patron klien, yang menghubungkan para pemimpin dan sub pemimpin dari berbagai kelompok atau golongan.

Berakhirnya Patronese

Hubungan patron-klien ini juga mempunyai akhir atau bisa diakhiri. Bagi Scott, seorang klien berpikir bahwa hubungan patron klien ini telah berubah menjadi hubungan yang tidak adil dan eksploitatif yaitu ambang batas yang berdimensi kultural dan dimensi kultural dn dimensi obyektif. Dimensi Kultural disini oleh Scott diartikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan minimum secara kultural para klien, Pemenuhan kebutuhan kultural itu misalnya acara ritual, kebutuhan sosial kolektif/kelompok dan lain-lain. Sedangkan dimensi obyektif lebih cenderung kepada pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang mendasarkan pada kepuasan diri. Seperti lahan yang cukup untuk memberi makan, memberi bantuan untuk orang sakit dan lain-lain. Hubungan ketergantungan yang memasok jaminan-jaminan minimal ini akan mempertahankan legitamasi hubungan antara patron-kliennya. Jika patron tidak sanggup memenuhi dua dimensi kebutuhan tersebut dalam konteeks kepuasan para klien, maka menurut Scott klien akan berpikir hubungan patron ini menjadi hubungan yang sifatnya dominatif dan eksploitatif.

Konsep ketidaksamaan dan ketidak-seimbangan

Sehubungan dengan soal keseimbangan ini foster (1963) juga menyebutkan bahwa baik dalam hubungan patron-klien maupun dalam relasi timbal-balik antar orang yang relatif sama statusnya (*colleague contract*), kesadaran atau kewajiban untuk memblas suatu pemberian mendasari keduanya. Dari penelitian yang dilakukannya tampak suatu hal yang menarik, yaitu bahwa meskipun barang serta jasa yang dipertukarkan tidak sama, seperti pada patronese, dan terhadap ketidak-seimbangan dalam tiap pertukaran, ternyata ketidak-seimbangan ini disengaja oleh kedua pihak, sebab tercapainya keseimbangan bisa berarti berhentinya kontrak atau hubungan timbal-balik tersebut.

Ringkasan Interpretasi Relasi Instrumental Patron-Klien

Teori relasi patron-klien Pelras secara ringkas bisa dikatakan sebagai relasi instrumental dua pihak yang tidak seimbang. Satu sisi ada segelintir para juragan yang *powerfull*, kaya sumberdaya namun butuh kesetiaan dan penghormatan. Di sisi lain ada banyak nelayan yang *Powerless*, miskin sumberdaya material namun memiliki potensi menjadi sumberdaya politik dan social. Keduanya terikat dalam nilai norma setempat, menjalin hubungan saling ketergantungan yang asimetris atau tidak seimbang.

Pola pikir Pelras seperti terangkum dalam tabel di atas akan digunakan untuk melihat fenomena hubungan patron-klien pada komunitas nelayan di Tanjung limau. Deskripsi dan interpretasi ini akan mencakup sejauh mana konsep-konsep relasi patron-klien Pelras ini bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena kehidupan para nelayan di Tanjung limau.

Hubungan antara patron-klien menjelaskan berupa hubungan ekonomi, hubungan sosial dan hubungan politik. Dalam hubungan ekonomi sang patron memberikan pinjaman/bantuan modal kepada si klien maka sang patron akan mendapatkan hadiah berupa bunga dan penghormatan dari kliennya. Kedua yaitu hubungan sosial dimana sang patron memberikan perlindungan dan kompensasi-kompensasi kepada si klien maka sebagai balasannya si klien akan patuh terhadap sang patron dan membantu patron secara sukarela tanpa imbalan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebelum ke lapangan peneliti menggunakan teori sebagai landasan untuk meneliti pola relasi antara para nelayan dengan juragan di Tanjung limau.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang akan peneliti tulis adalah hubungan antara juragan (patron) dan buruh nelayan (klien) diantaranya adalah :

1. Hubungan Sosial

2. Hubungan Ekonomi
3. Hubungan Politik

Hasil Penelitian

Relasi Antara Juragan Dan Para Buruh Nelayan

Relasi Ekonomi

Rekrutmen Tenaga Kerja

Hubungan ekonomi yang dijalin antara sang punggawa dengan para buruh nelayan menunjukkan bahwa keduanya saling membutuhkan satu sama lain, seorang juragan dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi menggunakan sumber dayanya sebagai pengaruh untuk menyediakan perlindungan. Serta keuntungan-keuntungan untuk para buruh nelayan dimana sang buruh nelayan membutuhkan suatu jaminan sosial terhadap orang yang lebih tinggi status ekonominya demi memenuhi kebutuhan ekonomi sang buruh.

Dalam hubungan kerja patron-klien antara sang punggawa dan para buruh nelayan terdapat sebuah rekrutmen untuk para calon buruh nelayan. Dalam rekrutmen tersebut terdapat kesepakatan-kesepakatan bersama yang harus disepakati antara kedua belah pihak, adapun ilustrasi tentang mekanisme rekrutmen tersebut yaitu seperti penuturan bapak Em, beliau menuturkan ;

“Sebelum saya merekrut anak buah terlebih dahulu saya lihat-lihat dulu orangnya bagaimana. Terus dia punya keterampilan atau tidak dalam membawa kapal saya itu salah satu syaratnya. Kedua mereka harus benar-benar punya niat mau bekerja, harus jujur juga, intinya bisa buat saya percaya-lah kepada mereka. Tetapi juga kebetulan anak buah saya ini kebanyakan memang teman saya sudah sejak lama dan sudah saya anggap mereka ini seperti keluarga sendiri.”
(wawancara, 15 September 2016)

Dari hasil keterangan di atas dapat diambil gambaran bahwasanya mekanisme dalam merekrut anak buah. Sang punggawa benar-benar teliti dalam memilah dan memilih anak buah. beliau menyeleksi calon anak buah yang benar-benar serius dan memiliki niat untuk bekerja demi usahanya. Selain itu anak buahnya juga harus dapat dipercaya dan harus mampu menanamkan kepercayaan kepada sang punggawa.

Agar terciptanya sebuah hubungan kerja yang diharapkan, beberapa buruh nelayan memang harus menunjukkan sikap hormat dan patuh akan kesepakatan-kesepakatan yang diberikan oleh sang punggawa. Akan tetapi kondisi yang terjadi ternyata beberapa buruh mengungkapkan dirinya tidak pernah menerima kesepakatan-kesepakatan tersebut dari sang punggawa bahwa dirinya harus mempunyai kriteria tertentu agar dapat bekerja dengan punggawa.

Sang punggawa menuntut sebuah niat dan kejujuran apabila ingin bekerja kepada beliau. Apalagi sang punggawa pemilik kapal memang harus benar-benar lebih teliti dalam merekrut anak buah karena hal tersebut menyangkut bagaimana anak buahnya mengoperasikan kapal. apabila terjadi sebuah kecelakaan atau hal

yang tidak bisa diprediksi itu bisa jadi membahayakan usahanya. Serta si buruh juga harus memiliki keterampilan dan pengalaman dalam menangkap ikan. Sehingga ketika pada saat melaut tangkapan atau hasil yang didapatkan dapat memuaskan.

Modal

Modal merupakan suatu hal yang penting dan menjadi kebutuhan utama bagi para pengusaha yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya. Begitu pula hal yang terjadi pada Hj. Emmang beliau membutuhkan modal agar usaha atau bisnisnya ini dapat berjalan. Bagi punggawa kapal menjadi modal utama namun kapal tidak bisa berjalan apabila tidak memiliki bahan bakar dan perlu ongkos untuk membelinya. Bukan hanya itu modal lain yang dibutuhkan yaitu seperti alat tangkap dan tempat untuk menampung ikan hasil tangkapan, serta konsumsi bagi setiap para buruh nelayannya selama mereka berlayar itu semua telah diperhitungkan.

Terdapat perbedaan sumber daya antara punggawa dengan nelayannya. Perbedaan yang mencolok adalah perbedaan soal modal jika dibandingkan dengan para buruh nelayan mereka tidak membawa apapun apalagi moda mereka hanya mengandalkan tenaga saja, mengenai hal tersebut sesuai dengan penuturan salah satu buruh nelayan yaitu Eko, Eko mengatakan ;

“Saya tidak punya modal. itu semua dari Pak Haji yang nanggung dari ongkos bahan bakar sampai makanan kami selama di laut. kalau kami disuruh bawa modal kasihan. Ndak ada modal kami cuma tenaga kami aja modalnya.” (wawancara 18 september 2016)

Berdasarkan penelitian maka dapat dilihat gambaran bahwasanya perbedaan sumber daya yang dimiliki sang punggawa dengan buruh nelayan memang sangat jauh berbeda. Sang juragan memiliki modal yang banyak sehingga mampu membuat buruh nelayan gampang patuh dan taat terhadapnya.

Mekanisme Pembagian Upah/Hasil

Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Upah begitu sangat berarti bagi setiap pekerja/buruh karena setiap pekerja/buruh memiliki kebutuhan hidup untuk sehari-hari. Maka hal tersebut bisa mereka dapatkan dari upah yang mereka terima.

Disamping itu hal yang perlu diketahui. Yaitu bagaimana mekanisme pembagian hasil/upah dan berapa upah yang didapatkan oleh para buruh nelayan dalam sekali melaut. Em menuturkan;

“Hasil dari melaut itu saya jual dulu kemana-mana. Biasanya saya jual bisa sampai ke luar kota. Pokoknya dimana penawaran harga ikan yang tinggi distu saya jual. Pokoknya saya cek kalau misalnya di sangatta ikan yang ini yang mahal di jual di sana, nah ikan ini yang saya jual kesana. Nah habis itu hasil dari penjualan itu kami hitung

dulu. Kemudian kami bagi 5 % buat perbaikan kapal selama melaut, setelah itu sisanya kami bagi lagi 50% buat saya 50% nya lagi buat mereka. nah disitu ada pembagian lagi buat nahkodanya sama nelayan , nahkodanya dia ambil bagian 50% dari sisa tadi dan sisanya dibagi lagi ke nelayan nelayan.” (wawancara 15 september 2016)

Hampir semua buruh yang diwawancarai memberikan keterangan serupa terkait mekanisme pembagian hasil/upah. Gambaran dari mekanisme di atas bahwa kondisi yang terjadi yaitu hasil dari melaut sang juragan menjualnya kepada para pengepul dan pengecer ikan. Setelah itu hasil dari penjualan tersebut dihitung dan dibagikan dari hasil penjualan. Hasil dari penjualan dipotong dengan biaya perawatan kapal yaitu sebesar 5%. Kemudian sisa dari biaya perawatan kapal dibagi dua antara sang juragan dan anak buahnya. Yaitu sang punggawa mengambil 50% dan 50% sisanya dibagi lagi kepada nahkoda dan anak buahnya. Nahkoda mengambil bagian sebanyak 50% dan 50% sisanya dibagi lagi kepada 17 orang buruh atau awak kapal. Sebagaimana rincian atau penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

Hasil dari penjualan = Rp 15.000.000

Ongkos perawatan kapal = (5%)

Jadi, 5% = Rp 750.000

$15.000.000 - 750.000 = \text{Rp. } 14.250.000$

Sisa hasil Rp.14.250.000 dibagi kepada sang punggawa sebesar 50 % Jadi, 50 % - Rp 14.250.000 = Rp 7.125.000 sisa Rp 7.125.000 dan dibagi lagi kepada nahkoda dan buruh nelayan (awak kapal). Nahkoda mengambil 50% dan sisanya dibagi kepada sang buruh (awak kapal).

Jadi Rp 7.125.000 -50% = Rp 3.562.500 dibagi kepada 17 orang buruh. Jadi total satu orang buruh mendapatkan Rp 209.559 dari hasil sisa penjualan.

Pembagian hasil di atas merupakan pembagian yang telah disepakati bersama dan tidak pernah ditolak oleh para buruh nelayan. Karena memang seperti itu mekanisme pembagiannya. Sang punggawa memiliki modal dan juga kapal, sehingga otomatis sang juragan yang mengambil penghasilan paling banyak. Kemudian nahkoda sebagai pemimpin sekaligus penunjuk arah serta mengetahui arah tempat dimana berkumpulnya ikan maka dia mendapatkan bagian setengah dari sisa pembagian dengan sang juragan pemilik kapal. Apabila dihitung dalam kebutuhan sehari-hari sang nahkoda pasti dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarganya. Lain halnya dengan para buruh nelayan yang hanya mendapat upah terakhir dari pembagian hasil karena mereka ini hanya memiliki keterampilan dan tenaga saja dalam menangkap ikan. Upah sang buruh dapat dikatakan sangatlah minim bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya untuk sehari-hari ditambah lagi dengan kebutuhan hidup di zaman sekarang mulai melonjak naik (mahal).

Disimpulkan bahwa peran sang punggawa begitu besar terhadap keadaan ekonomi anak buahnya ikatan kekeluargaan yang mereka jalin cukup erat terbukti apabila mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka dan tidak memiliki

bahan makanan, sang juragan memberikan pinjaman kepada anak buahnya dan mempersilahkan anak buahnya bisa menumpang hidup di tempatnya.

Jaminan Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang penting karena dengan tubuh yang sehat kita dapat melakukan segala kegiatan. Tapi tak hanya dibutuhkan tubuh yang sehat dalam kehidupan ini harus disertai dengan jiwa yang sehat pula. Untuk memiliki itu semua kita harus menjaga keseimbangan hidup kita dan menerapkan pola hidup sehat baik lahir maupun batin. Menyangkut hal tersebut apabila kondisi para buruh nelayan mengalami gangguan kesehatan secara tidak langsung pasti butuh perawatan dan biaya berupa obat-obatan ataupun semacamnya.

Seperti yang bisa kita ketahui bahwa kondisi ekonomi si buruh yang bisa dikatakan lemah, jadi apabila sewaktu-waktu si buruh mengalami hal tersebut kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka tidak sanggup untuk memenuhinya apalagi dengan biaya perawatan berobat. Tentunya pasti tidak akan sanggup untuk memenuhi itu semua. Maka dari itu untuk mencegah hal tersebut terjadi, sang juragan harus menyediakan jaminan kesehatan bagi anak buahnya. Menurut undang-undang Ketengakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 & 2 memiliki dua hak utama. Pertama setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan majikan atau pengusaha memiliki setidaknya tiga kewajiban yaitu yang pertama menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan. Kedua menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. Ketiga menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya ada sebagian buruh yang tidak mengetahui tentang jaminan kesehatan yang telah disediakan oleh sang punggawa. Mereka hanya menggunakan biaya pribadi untuk membeli obat karena hanya untuk membeli obat saja adalah suatu yang dapat dijangkau bagi ekonomi mereka. Terkecuali apabila mereka harus dirawat di rumah sakit dan harus diopname maka sang juragan akan menanggung biaya perawatan mereka.

Relasi Sosial

Kompensasi / Bantuan Sukarela

Para buruh nelayan menganggap juragan mereka sebagai keluarga mereka sendiri. Disaat mereka memiliki hajat sang punggawa pun biasanya membantu mereka dengan memberikan dana bantuan untuk hajat tersebut.

Kepatuhan Sosial

Antara sang punggawa dan si buruh nelayan harus menjunjung tinggi saling kepercayaan. Si buruh harus menaati segala perintah dan aturan yang diberikan oleh sang juragan dan jangan sekali-kali untuk dikhianati kepercayaan yang telah diberikan. Seorang punggawa harus menjaga nama baik keluarga buruhnya begitu juga sebaliknya seorang buruh juga harus menjaga nama baik dan kehormatan juragannya. Misalnya seorang buruh mengalami suatu masalah atau terlibat masalah dengan pihak luar contohnya terlibat masalah dengan punggawa yang lainnya atau aparat keamanan atau warga sipil. Sehingga terkait peran sang juragan pun di sini sangat besar. Sang juragan berusaha melindungi buruhnya karena apabila buruhnya terlibat masalah atau diganggu orang lain sama saja halnya membuat harga diri sang punggawa akan turun dimata orang lain.

Relasi Politik

Dukungan Masa

Sehubungan dengan relasi politik yaitu dimana segala usaha yang ingin dicapai bersama demi meraih tujuan atau cita-cita yang mulia. Hubungan politik bukan hanya sekedar dilihat dalam perebutan kekuasaan secara konstitusional. Akan tetapi yang terjadi dalam masyarakat nelayan Tanjung Limau. Hubungan politik yang mereka jalin yakni memiliki tujuan yang berbeda. Yaitu bagaimana caranya sang punggawa dengan segala usahanya membentuk relasi dengan pihak luar demi mensejahterakan para buruh nelayannya.

Imbalan Jasa

Hubungan sosial yang dijalin sangat erat antara sang juragan dengan si buruh nelayan. Saking eratnya hubungan yang mereka jalin, sehingga sang punggawa sudah menganggap anak buahnya sebagai keluarganya sendiri, begitu juga sebaliknya. Layaknya orang tua melindungi anak-anaknya begitulah yang dilakukan sang juragan oleh para buruh. Si buruh harus menjaga nama baik punggawanya dan begitu juga sebaliknya, sang punggawa harus menjaga nama baik anak buahnya. Sehingga pada saat anak buah sang punggawa terlibat masalah. Contohnya perkelahian atau intimidasi yang dilakukan punggawa lain atau orang dari pihak luar. Bisa juga apabila dalam proses pendistribusian ikan mobil yang dikendarai anak buah sang punggawa mengalami kelebihan muatan atau surat-surat kendaraan yang tidak lengkap. Hal tersebut bisa dikenakan sanksi tilang dari pihak kepolisian. Maka dari itu peran sang punggawa disini sangat besar bahwa sang punggawa harus berusaha melindungi anak buahnya dan segera menyelesaikan masalahnya, karena apabila tidak maka yang terjadi harga diri sang punggawa bisa turun di mata orang lain. Begitu juga pada saat sang juragan memiliki hajat. Disana anak buahnya berkumpul untuk membantu dengan sukarela hingga hajat tersebut selesai. Begitu juga halnya ketika anak buahnya memiliki hajat. Terkadang peran sang punggawa disini begitu besar. Beliau sebagai donatur terbesar dalam hajat tersebut sekaligus tokoh yang dihormati. Jadi

si buruh merasa terlindungi oleh sang punggawa sehingga para buruh merasa harus patuh dan taat terhadap sang punggawa.

Patuh dan taat merupakan salah satu tindakan yang dilakukan para buruh nelayan terhadap sang punggawa. Yaitu sebagai bentuk kesetiaan dan tanda balas budi kepada sang punggawa. Bagi buruh nelayan bukan hanya sekedar patuh dan taat saja merupakan bukti bahwa mereka menunjukkan kesetiaan terhadap juragan. Dalam hubungan politik sang buruh harus memberikan dukungan dari awal sampai akhir apabila sang punggawa mencalonkan diri sebagai pejabat contohnya saja dalam pemilu. Akan tetapi dalam masyarakat nelayan Tanjung Limau hubungan politik yang terjadi yaitu, sang juragan enggan untuk mengusung dirinya sebagai calon pemilu pada saat itu. Akan tetapi dalam hubungan politiknya dia lebih memilih untuk bekerja sama terhadap calon pemilu yang memiliki program untuk mensejahterakan nelayan. Karena hal tersebut demi kepentingan para buruhnya dan kepentingan sang punggawa. Agar citranya semakin tinggi dihadapan orang lain khususnya penduduk Tanjung Limau.

Kesimpulan

Penelitian ini menggambarkan suatu pola hubungan patron-klien yang terjadi di masyarakat nelayan Tanjung Limau. Hubungan patron-klien adalah hubungan yang berbentuk vertikal yaitu hubungan antara atasan dan bawahan. Hubungan ini dilakukan oleh majikan dengan anak buah. Scoot (1972) mengatakan bahwa hubungan patron-klien adalah “suatu kasus khusus hubungan antar dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi, kepada patron.”

Tanjung limau merupakan salah satu kawasan yang memiliki fenomena hubungan patron-klien. Dalam hubungan tersebut ditemukan beberapa hubungan yang terkandung dalam fenomena patron-klien diantaranya adalah hubungan ekonomi, hubungan sosial dan hubungan politik.

Ketiga komponen tersebut memiliki unsur masing-masing yang saling berkaitan, sehingga menimbulkan sebuah gejala hubungan patron-klien. Seorang punggawa nelayan di Tanjung Limau memiliki sebuah modal yaitu kapal dengan perlengkapan menangkap ikan, sedangkan si buruh nelayan hanya memiliki tenaga. Sehingga pada saat pembagian hasil sang punggawa-lah orang yang mengambil bagian paling banyak dan si buruh mengambil bagian paling sedikit. Tentu hal tersebut memiliki dampak bagi si buruh, karena dari hasil tersebut tenaga yang dipakai si buruh tidak seimbang dengan hasil yang diterima. Walaupun demikian hal tersebut menjadi suatu kondisi yang dapat diterima oleh si buruh nelayan mengingat sang punggawa yang telah memberikan barang dan jasa kepada si buruh nelayan.

Bukan hanya itu tetapi ada alasan lain bagi si buruh nelayan sehingga mereka menerima kondisi tersebut, seperti perlindungan, kompensasi jaminan bagi si buruh nelayan yang telah diberikan oleh sang punggawa. Sehingga bagi si buruh nelayan timbul rasa kewajiban untuk membalas budi atas jasa yang diberikan oleh sang punggawa yaitu berupa kesetiaan, penghormatan, bantuan sukarela dan dukungan-dukungan. Sehingga bagi si buruh maupun punggawa hubungan ini akan terus berlanjut lama karena menurut mereka hubungan ini memberikan keuntungan bagi keduanya .

Kehidupan para buruh nelayan yang selalu terjebak dalam kemiskinan dan tidak terlepas dari keberadaan punggawa, seharusnya para buruh nelayan mulai mencari kehidupan yang layak, dan hidup mandiri. Tetapi banyak hal yang harus dipersiapkan mengingat skill yang dimiliki para buruh nelayan satu-satunya yaitu dalam hal melaut. Setidaknya diperlukan beberapa bekal kreativitas yang lain apabila si buruh ingin meningkatkan penghasilan mereka, yaitu mulai dari permasalahan modal hingga pelatihan-pelatihan seperti cara menggunakan kapal dengan teknologi yang canggih hingga pelatihan manajemen keuangan dan tidak kalah pentingnya lagi yaitu tehnik pemasaran apabila si buruh ingin menjual hasil tangkapannya.

Saran

Kota Bontang merupakan kota industri yaitu kota yang di dalamnya beroperasi dua perusahaan raksasa yang menghimpit area tersebut. Masalah kesejahteraan para nelayan mestinya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah kota ini. Program-program pemberdayaan bisa di kreasikan dengan pola kemitraan antara pemerintah Kota Bontang dengan perusahaan. Agar tidak terjadi tumpang tindih program-program pemberdayaan sebaiknya memiliki komunikasi ketiga belah pihak dalam merumuskan program-program yang di rencanakan. Beberapa hal yg bisa di rencanakan dan bisa di komunikasikan pelaksanaannya antara pemerintah Kota Bontang dengan perusahaan, di antaranya adalah :

1. Modal

Pada dasarnya faktor utama penghambat bagi para nelayan adalah modal. Pemerintah harus responsif dengan memberikan program bantuan berupa kapal beserta alat tangkap ikan. Agar tercipta sebuah kemandirian bagi para nelayan yang tidak selalu bergantung terhadap sang punggawa. Sehingga peran perusahaan dapat di posisikan dalam memberikan pelatihan berupa maintenance kapal atau perawatan kapal.

2. Teknologi

Bukan hanya itu pengembangan teknologi bagi para buruh nelayan merupakan unsur penting yang harus di perhatikan. Mengingat selama ini para nelayan masih menggunakan teknologi secara tradisional dan hal tersebut berdampak kepada minimnya hasil tangkapan mereka. Sehingga dengan pengembangan teknologi yang diberikan kepada para nelayan, hasil

tangkapan mereka bisa lebih banyak. Harus perlu diingat bahwa pengembangan teknologi yang diberikan kepada nelayan harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka, baik dari segi kapasitas, kemampuan dan keterampilan sumber daya mereka. Peran pemerintah dapat dilibatkan dalam memberikan bantuan berupa teknologi dengan alat yang lebih modern. Sehingga melalui perusahaan sebagai mitra binaan dapat di posisikan dalam memberikan bimbingan dan pengetahuan terhadap nelayan bagaimana cara merawat dan mengoperasikan teknologi tersebut.

3. Pelatihan Manajemen Keuangan

Pelatihan manajemen keuangan juga perlu diberikan kepada nelayan. Pelatihan manajemen ini dapat di posisikan kepada perusahaan sebagai mitra binaan untuk memberikan pengetahuan, wawasan maupun keterampilan bagi para nelayan pada saat mereka tidak melaut karena terkendala oleh cuaca. Sehingga minimal mereka harus mempunyai tabungan dan tetap mendapatkan penghasilan untuk dipakai selama mereka tidak pergi melaut.

4. Teknik Pemasaran

Kemudian dari segi pemasaran pemerintah harus membuka akses yang lebih luas bagi para nelayan yang ingin mengembangkan usahanya tersebut. Karena pasar merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha. Tidak adanya pasar dan strategi pemasaran bisa menjadi kendala dalam sebuah usaha apabila tidak berkembang.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H.S. 1993. *Politik Perubahan Agrarian dan klientalisme di Indonesia: Bantaeng, Sulawesi Selatan, 1983-1993*, Ph.D Disertasi. Universitas Columbia, New York City.
- 1996. "Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan: Kondisi pada Akhir Abad 19". *Prisma* 6:29-45.
- Bailey, F.G. 1997 (1969). *Siasat dan Spoil: A Social Anthropology of Politics*. Basil Blackwell.
- Boissevain, J. 1966a. "Politik dan Kemiskinan di Sisilia Agro-Town". *Arsip Internasional Etnography* 50: 198-236
- 1996b. "Patronege in Sicily". *Man (NS) 1 (1)*: 18-33.
 - 1969. "Patron Sebagai Makelar". *Panduan Sosiologi* 16: 379-386.
 - 1974. *Teman dari Teman: Jaringan, Manipulator, dan Koalisi*. Oxford: Basil Blackwell.
- Foster, G.M. 1961. "The Dyadic Contract: Sebuah Model Struktur Sosial dari Desa Petani Mexico". *American Anthropologist* (6): 1173-1192.
- 1963. "Kontrak Dyadic di Tzintzuntzan II: Hubungan Patron-Klien". *Antropologi Amerika* 65:
- Lande, CH (1997) Pengenalan: The Dyadic Dasar klientalisme. Dalam: SW. Schmidt et al. (eds) *Teman, Pengikut dan Fraksi*. Berkeley: University of California Press. (p xiii-xxxviii).

Scott, JC (1972) Politik Patron-Klien dan Perubahan Politik di Asia Tenggara. Ilmu Politik Amerika Review 66 (1):91-113.

Koentjaraningrat. 1974. Masyarakat Indonesia Masa Kini. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.